

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kedaulatan merupakan masalah yang sangat pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain, berarti eksistensi suatu negara diakui. Dengan adanya landasan kedaulatan tersebutlah, maka suatu negara dapat menjalankan berbagai macam hubungan dan jalinan kerjasama dengan negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional untuk lebih meningkatkan kepentingan nasional dan kemajuan bangsanya.

Taiwan merupakan negara yang mempunyai posisi yang sangat unik dalam percaturan politik dunia. Secara de facto, Taiwan memang mencirikan suatu negara yang telah merdeka dan berdaulat. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang hanya 26 negara saja yang secara resmi telah memberikan pengakuan atas kedaulatan Taiwan. Mayoritas negara-negara di dunia lebih mengakui kedaulatan RRC yang dianggap merupakan wakil sah daratan Cina. Kebanyakan dari negara-negara tersebut menjalankan "One China Policy".

Berdasarkan latar belakang historis, Taiwan merupakan bagian propinsi resmi negara Cina atau RRC, tetapi karena terjadi perang saudara pada tahun 1949, mengakibatkan Daratan Cina terpecah menjadi dua, yaitu Republik Rakyat Cina atau RRC dan Republic of China (ROC) atau Taiwan. Kedua negara tersebut

Pemerintah Cina. Masalah ini menjadi dilema yang berkepanjangan sampai saat ini dan membuat posisi Taiwan menjadi terkatung-katung.

Meskipun demikian tidak menyurutkan langkah Taiwan untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah entitas ekonomi yang kuat sekaligus sebagai entitas politik yang kuat dan disegani. Taiwan sebagai negara yang berdaulat terus berjuang dalam meningkatkan kepentingan nasionalnya dan berupaya melindungi keamanan nasional, serta terus berupaya memperoleh status yang sama dalam masyarakat internasional, bertanggung jawab dan terhormat dalam kancah masyarakat internasional dewasa ini. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kedaulatan Taiwan sebagai tema penulisan dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis menetapkan “ **STRATEGI TAIWAN DALAM MEMPERTAHANKAN PENGAKUAN KEDAULATAN DI FORUM INTERNASIONAL** “ sebagai judul penulisan ini.

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Berusaha mengkaji permasalahan yang muncul dan menjawab pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang strategi atau langkah-langkah apa yang diambil oleh Taiwan untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya dan sekaligus mempertahankan pengakuan kedaulatan yang telah diperolehnya.
2. Untuk mempelajari dan menjelaskan aktor dan perilaku internasional dalam hubungan internasional dengan ilmu dan pengetahuan

yang didapat di bangku perkuliahan dalam rangka mengembangkan wawasan dan intelektual penulis.

3. Untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Permasalahan**

Hidup dalam ketidakpastian sungguh tidak nyaman. Inilah yang banyak dirasakan oleh rakyat Taiwan selama ini. Meski secara umum ada tingkat kemakmuran tertentu yang telah dicapai selama ini, urusan pokok dengan Cina Daratan sulit dihapus begitu saja dari ingatan atau kesadaran. Urusan pokok yang dimaksud adalah masalah kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdiri sendiri, lepas dari RRC yang sampai saat ini masih tetap teguh dengan klaimnya yang menyatakan Taiwan sebagai propinsi bagiannya yang membangkang.

Pada 6 September 2003 yang lalu, muncul demo yang diikuti lebih dari 50.000 orang di jalan-jalan Taipei. Mereka diberitakan menuntut kemerdekaan, lepas dari RRC dan mengganti nama resmi menjadi Taiwan, bukan lagi Republik Cina. Menurut rakyat Taiwan, harapan agar mereka bisa masuk dalam komunitas internasional sebagai negara yang terpisah tidak akan pernah terwujud selama nama negara mereka tidak diganti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Martin, R. (2003). *Taiwan: The Struggle for National Identity*. New York: Oxford University Press.

Pihak Cina Daratan sendiri gusar dengan aksi pro-kemerdekaan tersebut. Mereka menyebut aksi demo ini sebagai upaya untuk menyabot hubungan antara kedua belah pihak. Sikap Cina Daratan ini tidak mengherankan karena Beijing mengklaim Taiwan sebagai teritorinya dan mengancam akan menggunakan kekuatan kalau pulau tersebut secara formal menyatakan kemerdekaan. Menurut Pemerintah RRC, demo pro-kemerdekaan tersebut mencoba memisahkan Taiwan dari Cina dan melanggar opini sebagian besar publik Taiwan yang menginginkan perdamaian, stabilitas dan pembangunan.

Menyimak perkembangan terakhir antara Taiwan dan RRC ini, memang yang tampak adalah kehidupan rakyat Taiwan yang seolah-olah disandera oleh ketidakpastian politik. Sebagian besar warga Taiwan adalah orang yang bermigrasi dari Cina Daratan. Meskipun demikian, hubungan politik di antara kedua belah pihak secara historis lemah dan mereka sepenuhnya terpisah sejak tahun 1949 ketika komunis menguasai daratan. Taiwan sendiri merupakan koloni Jepang dari tahun 1895 sampai tahun 1945.

Akan tetapi meski secara ekonomi makmur, tampaknya di kalangan warga sendiri terus muncul aspirasi agar mereka dapat lebih leluasa mengembangkan diri dan tampil di panggung internasional sebagai satu bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain.

Secara de facto Taiwan mempunyai ciri negara yang merdeka. Taiwan memiliki wilayah sendiri, pemerintahan sendiri, memiliki mata uang yang diterima dalam transaksi global dan memiliki pasukan militer sendiri seperti

kedaulatan Taiwan memang menjadi sebuah dilema yang mempersulit posisi Taiwan. Adanya kebijakan satu Cina (One China Policy) dan persoalan reunifikasi yang berlarut-larut merupakan faktor yang menghambat usaha-usaha Taiwan dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia.

Kemungkinan munculnya Taiwan sebagai sebuah negara yang merdeka memang menjadi persoalan serius. Potensi ini sebenarnya sudah muncul sejak Taiwan masih berada di bawah kekuasaan Lee Teng-hui yang mencabut diberlakukannya keadaan darurat sisa peninggalan Jiang Kai-shek yang melarikan diri dari Daratan Cina setelah terdesak mundur oleh pasukan komunis. Lee Teng-hui menuntut seharusnya hubungan antara Taiwan dan RRC didasarkan pada "hubungan antara negara dengan negara".<sup>2</sup> Dan disederhanakan lagi oleh Presiden Chen Shui-bian, ketika dicalonkan menjadi presiden mewakili Partai Progresif Demokrat (PPD). Chen Shui-bian mengatakan bahwa dia akan mendasarkan hubungan antara RRC-Taiwan menggunakan formulasi "hubungan negara dengan negara yang khusus".<sup>3</sup>

Pernyataan tentang "dua negara" Cina seperti yang diutarakan Lee Teng-hui jelas mengancam integritas teritorial Cina yang melihat sebuah pernyataan kemerdekaan Taiwan akan mengancam keamanan nasional mendasar RRC dalam dua hal.<sup>4</sup> *Pertama*, mendorong semakin berkembangnya semangat kemerdekaan propinsi Cina lainnya seperti Xinjiang, Tibet dan Mongolia Dalam. Dan *kedua*,

---

<sup>2</sup> Rene L. Patiradjawana, *Mengubah status Quo hubungan Taiwan-RRC*, Kompas, Jum'at 13 Agustus 1999.

<sup>3</sup> Rubrik Internasional, Kompas, Jum'at 17 Maret 2000.

<sup>4</sup> Kompas, *Op.cit.*

menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan Taiwan bersekutu dengan kekuatan yang tidak bersahabat dengan RRC. Sebaliknya, Taiwan sendiri mulai melihat dan menyadari bahwa setelah persoalan kembalinya kedaulatan Hongkong dan Makao di tangan RRC, masalah Taiwan akan menjadi fokus utama para pemimpin di Beijing.

Sedangkan dari pihak RRC tetap pada keinginannya dengan menawarkan formula “satu negara dua sistem”, dan akan menggunakan kekerasan apabila terjadi lima keadaan yang memungkinkan bagi RRC untuk menggunakan kekerasan dalam proses reunifikasi.<sup>5</sup> Lima keadaan tersebut adalah : *Pertama*, pernyataan kemerdekaan oleh Taiwan.<sup>6</sup> *Kedua*, pembangunan persenjataan nuklir oleh Taiwan. *Ketiga*, penyimpangan diplomatik Taiwan ke Uni Soviet. *Keempat*, hilangnya pengawasan dalam negeri Taiwan atas suksesi kepemimpinan akibat pluralisme sosial. Dan *kelima*, kegagalan Taiwan merundingkan reunifikasi dalam jangka waktu yang terlalu lama.

Antara Taiwan dan RRC saling bersaing dalam memperbanyak “teman”. Kedua negara melakukan lobby ke negara-negara tetangga dalam rangka memperoleh pengakuan internasional tentang identitas diri atau kedaulatan negaranya. Usaha RRC mendapatkan kembali pengakuan internasional telah mendapatkan hasil. Keberhasilan itu bisa dilihat dari beberapa hal seperti : duduknya delegasi RRC dalam Dewan Keamanan PBB menggantikan delegasi

---

<sup>5</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 189.

<sup>6</sup> Setelah Presiden Lee Teng-hui melontarkan gagasan pembentukan negara merdeka dan berdaulat pada tahun 1999, RRC langsung melakukan latihan militer secara besar-besaran di Selat Taiwan (dulu Selat Formosa). Pameran kekuatan militer RRC sempat membuat masyarakat internasional menahan nafas. Namun keadaan mereda setelah Amerika Serikat melakukan manuver pasukan dekat selat Taiwan sebagai isyarat akan memihak Taiwan. (http://www.rrc.gov.tw)

Taiwan memberinya citra kekuatan besar yang baru, kemudian pembukaan hubungan diplomatik resmi dengan hampir setiap negara kapitalis besar, termasuk Amerika Serikat –yang hampir 30 tahun lamanya menjadi penghambat utama gerakan RRC dalam mencari penghargaan internasional dan secara terang-terangan memusuhi RRC- menjadi puncak usahanya yang sabar dan gigih untuk diterima di masyarakat internasional, dan menjelang akhir tahun 1985 RRC memiliki hubungan diplomatik dengan 130 negara, yang mewakili aneka bentuk pemerintahan, dari komunis sampai kediktatoran sayap kanan.<sup>7</sup>

Taiwan sendiri sampai saat ini baru secara resmi diakui oleh 26 negara yang mayoritas berada di kawasan Afrika serta Amerika Selatan. Pada 3 November 2004 yang lalu Taiwan berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Vanuatu. Hal ini tentunya merupakan hal yang baik bagi perkembangan Taiwan dalam pergaulan internasional. Semakin banyak negara yang mengakuinya berarti eksistensi dirinya akan semakin diakui. Selain itu Taiwan juga turut menjadi anggota dalam beberapa organisasi internasional.

Taiwan memiliki kantor perwakilan diplomatik di setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Sedangkan untuk negara-negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengannya Taiwan hampir dipastikan memiliki kantor perwakilan dagang dan ekonomi. Dalam era globalisasi yang antara lain menekankan kerjasama ekonomi, posisi kantor perwakilan perdagangan menjadi sangat penting.

---

<sup>7</sup> Walter S. Lee, *Op. Cit.* hlm. 102

Sejak terpisah dari Cina, Taiwan telah membangun suatu fondasi kekuatan negara yang berbasiskan kekuatan perekonomian yang mantap dan stabil. Dengan bermodalkan kekuatan ekonomi tersebut, Taiwan dapat menciptakan kemajuan bagi bangsanya dan kemakmuran bagi warganya. Kesuksesan perkembangan ekonomi Taiwan selama ini tercapai berkat Pemerintah Taiwan memanfaatkan ekonomi bebas, menerapkan sistem ekonomi marketing, melakukan reformasi ekonomi serta usaha kerjasama dengan para pengusaha. Ekonomi Taiwan bertumbuh dengan stabil dan menurut beberapa pengamat ekonomi akan terus berkembang sehubungan dengan membaiknya fundamental ekonomi saat ini.

Neraca perdagangan Taiwan dengan dunia pada tahun 2001 menunjukkan surplus US \$ 13,873 milyar dengan rincian ekspor sebesar US \$ 112,60 milyar dan impornya sebesar US \$ 98,73 milyar. Sedangkan pendapatan perkapita pada tahun 2003 yang lalu telah mencapai US \$ 13.000. Tahun 2004 ini angka itu diperkirakan naik menjadi US \$ 13.400. Hasil ini jelas merupakan suatu kemajuan yang pesat. Pada tahun 1960 pendapatan perkapita mereka hanya sekitar US \$ 80.

Meskipun Taiwan telah berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara, tetapi hal itu bukan berarti bahwa Taiwan telah mencapai tujuan akhirnya. Dengan berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan tersebut, tantangan yang harus dihadapi oleh Taiwan untuk menjaga agar hubungan yang terjalin dengan negara-negara tersebut tetap bisa bertahan dan langgeng juga semakin besar.

RRC selalu melakukan pengawasan atas setiap usaha-usaha Taiwan dalam



langkah-langkah Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. RRC selalu berusaha “menyabot” hubungan Taiwan dengan negara lain dengan berbagai cara. Taiwan memperkirakan RRC akan mempercepat sekaligus menyelesaikan isolasi diplomatiknya, dengan cara agresif mendekati 26 negara yang mempunyai hubungan resmi dengan Taiwan, dengan maksud agar negara-negara yang bersangkutan bersedia mengalihkan pengakuan kedaulatannya kepada Cina.

Salah satu penyebab putusnya hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Republik Dominika pada akhir maret 2004 yang lalu antara lain disebabkan karena adanya campur tangan RRC. Menurut Taiwan, RRC telah memberikan bantuan dana kepada pulau di Karibia itu sebanyak 100 juta dolar untuk memuluskan jalannya. Akibat perbuatan pemerintah RRC tersebut, Taiwan harus menelan kekecewaan yang sangat pahit. Pemerintah Cina sering memakai strategi “Diplomasi Dolar” untuk mempengaruhi negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan agar memutuskan hubungan diplomatiknya tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik seperti yang terjadi dengan Republik Dominika tersebut tentu membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi Taiwan sendiri. Dari sini bisa dilihat bahwa perjuangan Taiwan untuk dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan lepas dari RRC tidaklah semudah yang dibayangkan. Bukan hal mudah bagi Taiwan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain dan menjalin hubungan diplomatik. tetani lebih tidak mudah lagi untuk bisa mempertahankan

Oleh karena itu, Taiwan berusaha melancarkan berbagai strategi untuk terus mempertahankan hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan negara-negara yang telah memberikan pengakuan kedaulatan kepada Taiwan sekaligus berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara yang lain. Dengan adanya pengakuan kedaulatan berarti eksistensi Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri diakui oleh masyarakat internasional.

#### **D. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut : **“Strategi apa yang digunakan oleh Taiwan untuk mempertahankan pengakuan kedaulatan yang sudah diperolehnya?”**.

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk dapat membantu menjelaskan pokok permasalahan di atas, penulis menggunakan konsep strategi.

#### **Konsep Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategis” yang diartikan sebagai *the art of general*. Jauh sebelum abad ke-19 nampak bahwa kemenangan suatu bangsa banyak tergantung pada adanya panglima-panglima perang yang ulung dan bijaksana. Antoine Henri Jomini (1779-1860) dan Karl Von Clausewitz (1780-

1831) adalah diantaranya yang merintis dan memulai mempelajari strategi secara ilmiah. Jomini memberikan pengertian yang bersifat deskriptif. Ia katakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi, sedangkan Clausewitz memberikan rumusan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran-pertempuran untuk kepentingan perang. Pengertian strategi yang terbatas pada militer dalam perang saja berlaku sampai abad ke-18.

Dalam abad modern sekarang ini, arti strategi telah meluas jauh dari arti semula menurut pengertian militer. Pengertian strategi tidak lagi terbatas pada konsep ataupun seni seorang panglima di masa perang, tetapi sudah berkembang dan menjadi tanggung jawab seorang pimpinan. Dengan semakin kompleksnya perang dan masyarakat, strategi semakin harus memperhitungkan faktor-faktor non militer, seperti ekonomi, politik, psikologi, moral dan teknologi. Dengan demikian strategi tidak saja merupakan konsep perang, tetapi juga telah menjadi unsur yang inheren dari kenegarawanan dalam waktu perang dan damai.

Pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas. Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional. Juga perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan, bukan tindakan untung-untungan. Seperti didefinisikan oleh John

keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif yang hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.<sup>7</sup>

Sekarang ini, strategi telah menjadi seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan sumber daya nasional, termasuk kekuatan militer untuk “meraih” atau “mengamankan” kepentingan-kepentingan vital bangsa (tujuan-tujuan nasional). Kekuatan-kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut disebut “strategi akbar” atau strategi nasional. Strategi merupakan seni, oleh karena penglihatan dan pengertian itu memerlukan intuisi, seakan-akan “merasa”, dimana ia sebaiknya menggunakan kekuatan-kekuatan yang tersedia dan bilamana ia sebaiknya melakukan itu.<sup>8</sup>

Taiwan sendiri menyadari bahwa posisi dirinya secara politis tidak begitu menguntungkan. Taiwan tidak leluasa bergerak di kancah internasional karena terhambat prinsip One China Policy. Kebijakan tersebut menyudutkan Taiwan yang selalu konsisten menyatakan dirinya sebagai negara yang independen, bukan bagian dari RRC. Pelaksanaan hubungan diplomatik dengan 26 negara di berbagai kawasan, juga merupakan salah satu bukti konsistensi Taiwan untuk menunjukkan kedaulatan negaranya.

Berbagai hambatan dan tantangan yang datang dari Pemerintah RRC yang selalu berusaha “mengganggu” hubungan diplomatiknya, mau tidak mau memaksa Pemerintah Taiwan untuk mengambil kebijakan untuk mempertahankan pengakuan kedaulatan yang telah diperoleh Taiwan. Langkah itu ditempuh

---

<sup>7</sup> Mochtar Mas' oed, *Studi hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta : Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1998, hlm. 90

<sup>8</sup> D. P. ...

Taiwan dengan mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan serta pemberian bantuan-bantuan ekonomi kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Dengan basis kekuatan perekonomian yang besar sebagai sumber daya nasionalnya, Taiwan menyadari peluangnya untuk bisa melaksanakan strategi tersebut.

Penggunaan tindakan ekonomi serta perdagangan internasional sebagai bagian instrumen politik luar negeri, bukanlah merupakan hal baru dalam lingkup politik internasional. Pada masa silam, perundingan barter selalu menjadi indikator bagi baiknya suatu hubungan antar negara. Pada zaman kita, berbagai kebijakan dan tindakan ekonomi sudah memperoleh arti yang lebih penting dan juga konkret dalam kerangka penyelenggaraan politik luar negeri.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, sebagai instrumen politik luar negeri, tindakan ekonomi mempunyai sifat dan efektivitas yang berbeda dari diplomasi. Bila diplomasi banyak bertumpu pada kecakapan personal dan keterampilan untuk memanfaatkan situasi maupun tatanan internasional yang tersedia, tindakan ekonomi sudah merupakan instrumen yang lebih banyak mengandalkan kekuatan nyata dalam bentuk modal, sumber daya, serta “managerial know how”.

Itulah sebabnya mengapa penggunaan tindakan ekonomi sebagai instrumen politik luar negeri menjanjikan hasil yang lebih banyak bagi negara yang memang dapat mengandalkan diri pada kekuatan ekonomi yang mengesankan.

Dalam analisis strategi politik luar negeri, dimulai dengan asumsi-asumsi :

1. Perilaku politik luar negeri suatu negara bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan internasional. Setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan itu.
2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara bangsanya. Ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan masing-masing, dinilai berdasar analisis biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah yang memenuhi kriteria efisiensi.
3. Dalam dunia yang saling bergantung ini, berarti bahwa para pembuat keputusan itu harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara bangsa lain.<sup>10</sup>

Penggunaan tindakan ekonomi seperti yang diterapkan oleh Taiwan sebagai instrumen politik luar negeri menjanjikan hasil yang positif mengingat Taiwan merupakan negara yang memang dapat mengandalkan diri pada kekuatan perekonomian yang mengesankan. Apalagi ke-26 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, sebagian besar termasuk negara kecil. Dari sini dapat kita lihat bahwa kedua pihak sama-sama mendapat keuntungan. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Taiwan dirasa telah cukup tepat, karena mengacu pada sasaran yang berupa kepentingan nasional yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Mempertahankan negara penerima bantuan sebagai sekutu politik, maksudnya dengan penggunaan tindakan ekonomi berupa bantuan luar negeri kepada negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik

dengan Taiwan diharapkan mereka tidak mengubah orientasi politik mereka dan terus mendukung dan mengakui kedaulatan Taiwan.

- b. Mencegah penerima bantuan menjadi sekutu lawan. Taiwan tentu tidak menginginkan pengakuan kedaulatan yang sudah didapatnya dengan susah payah lepas begitu saja dan beralih ke RRC sebagai suatu bentuk pelaksanaan prinsip One China Policy, bagi Taiwan RRC merupakan saudara sekaligus musuh yang harus diwaspadai.

Bagi negara penerima bantuan sendiri, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan itu sendiri sangat menguntungkan. Karena dengan demikian negara-negara tersebut dapat melaksanakan pembangunan negaranya demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga negaranya.

Pada tahun 2002 yang lalu, Presiden Taiwan Chen Shui-bian saat melakukan kunjungan ke Karibia, Amerika Tengah dan Afrika menawarkan bantuan sebesar US \$ 250 juta untuk berbagai proyek pembangunan, terutama di negara-negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan di ketiga kawasan yang dikunjunginya.<sup>11</sup> Hal ini dimaksudkan agar Taiwan memperoleh dukungan dan citra yang lebih baik serta dapat menjaga hubungan dengan negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengannya.

Taiwan juga mendirikan International Cooperation and Development Fund (ICDF) yang berfungsi untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Tengah serta Afrika. ICDF mempunyai proyek dan program bantuan serta pinjaman dana

---

<sup>11</sup> Ibid., hal. 101-102.

jangka panjang untuk membantu mengatasi masalah-masalah pembangunan di kawasan tersebut, khususnya bagi negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.<sup>12</sup>

#### **F. Hipotesa**

Dari rumusan permasalahan yang ada, yang kemudian didukung oleh kerangka teori yang telah ditetapkan, maka penulisan karya ilmiah ini akan dimulai dari hipotesa sebagai berikut :

Untuk mempertahankan pengakuan kedaulatan yang telah diperolehnya, Taiwan mengandalkan pilar ekonominya yaitu melalui pemberian bantuan ekonomi ataupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan dan kerjasama di negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, serta menggalang dukungan dari negara-negara maju.

#### **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasan tidak mengalami perluasan yang menyebabkan hasil dari penulisan karya ilmiah ini menjadi rancu, kurang terfokus dan kurang ilmiah tentunya.

Untuk itu, jangkauan dalam karya ilmiah ini ditekankan atau dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis yaitu antara tahun 1990-2004. Namun demikian, penelitian ini juga akan mengambil data-data di luar waktu yang telah ditentukan

---

<sup>12</sup> Lihat di <http://www.indonesia-taiwan.com/> Akses Selasa, 4 Januari 2005



di atas selama data-data tersebut masih relevan dan mendukung kelengkapan penelitian ini.

#### **H. Tehnik Pengumpulan Data**

Penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitif, dimana data-data yang diperoleh penulis nantinya akan dianalisa untuk bisa menjawab pokok permasalahan yang ada dan membuktikan kebenaran hipotesis.

Pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan studi pustaka (library research) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, majalah, jurnal, koran, surfing dan browsing internet serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Data-data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori ataupun konsep-konsep yang telah ditetapkan. Meskipun hanya merupakan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penulisan ini tidak mengurangi kebenaran ilmiahnya. Insya Allah.

#### **I. Rencana Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan materi ke dalam lima bagian yang tertulis dalam bab dan selanjutnya akan dibahas dalam sub bab.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan meliputi : alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesis, cakupan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II berisi uraian mengenai Taiwan yang meliputi penjelasan tentang keadaan geografi, demografi, sistem pemerintahan, sejarah singkat munculnya dua Cina serta perekonomian Taiwan.

Bab III berisi uraian tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Taiwan dalam mempertahankan pengakuan kedaulatan di forum internasional yang meliputi kebijakan satu Cina dan pengaruhnya bagi status Taiwan, persoalan reunifikasi Taiwan dan RRC, upaya Cina dalam merebut pengakuan kedaulatan serta perkembangan hubungan antara Taiwan dan RRC.

Bab IV berisi analisa mengenai usaha Taiwan dalam menggalang pengakuan kedaulatan serta analisa mengenai strategi-strategi yang digunakan Taiwan untuk mempertahankan hubungan diplomatik dan pengakuan kedaulatan yang diperolehnya.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan